

ABSTRAK

Lembaga Permasayarakatan Klas II B Pekanbaru membina narapidana wanita dalam kondisi hamil 2 orang dan menyusui 2 orang. Berdasarkan hasil pengamatan, hak-hak dan kepentingan narapidana wanita kurang terpenuhi dengan baik. Adanya fasilitas kesehatan baik untuk narapidana wanita juga tersedia, selain itu tempat-tempat sebagai kegiatan sehari-hari, tempat tidur atau kamar mandi juga tersedia, akan tetapi kurang layak untuk digunakan, mengingat kondisi yang jauh dari kata bersih. Selain adanya fasilitas yang diberikan di Lapas perlu adanya pembinaan moril kepada narapidana wanita khususnya yang memiliki tanggungan balita dan sedang mengandung.

Masalah dalam penelitian adalah bagaimana perlindungan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Permasayarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999 dan apa hambatan perlindungan hak terhadap narapidana wanita hamil dan menyusui di Lembaga Permasayarakatan Klas II B Pekanbaru berdasarkan PP No. 32 Tahun 1999.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *observationonal reseach* atau survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan sifat penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan tentang perlindungan hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

Perlindungan hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui belum diatur secara khusus dan resmi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, yang didalamnya mengatur tentang hak-hak narapidana. Tidak dipisahkan pengaturan antara narapidana laki-laki dan wanita, yang konsekuensinya secara kodrat kebutuhan nabi perempuan yang berbeda dengan nabi laki-laki tidak dapat terpenuhi di dalam lembaga permasayarakatan terutama hak narapidana wanita hamil dan menyusui.

Hambatan yang ditemui dalam perlindungan hak-hak narapidana perempuan ini adalah kurang adanya perhatian dari pemerintah, yaitu pemerintah tidak menciptakan Undang-Undang resmi khusus untuk pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan. Hambatan yang lainnya adalah kurang profesionalnya kinerja para pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini karena kurangnya sumber daya manusia sehingga pelayanan yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II B Kota Pekanbaru tidak berjalan maksimal dan tidak menjangkau seluruh tugas yang dibebankan.